



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIKURRAHMAN**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **550624**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 390.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/140 m2 di HULU SUNGAI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di HULU SUNGAI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 183.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA CICOZNE16MEA/T / SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 25X / SCOOTER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 97.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 670.000.000**

III. HUTANG **Rp. 8.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 662.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.